

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan faktor krusial dalam mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik di tingkat desa. Faktor perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia, secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan APBDes. Namun, faktor administrasi pengelolaan keuangan tidak memoderasi hubungan Perencanaan Anggaran dan Kompetensi SDM dengan Kinerja Penyerapan APBDes. Namun, Administrasi Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif dan tetap menjadi faktor pendukung Kinerja Penyerapan APBDes.

1. Kinerja penyerapan anggaran desa

Kinerja penyerapan anggaran desa di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai cukup optimal. Hal ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sektor publik, serta menandakan tingkat pertanggungjawaban moderat dalam penggunaan sumber daya publik secara efektif dan efisien. Meskipun demikian, tantangan muncul dalam menyesuaikan realisasi anggaran dengan perencanaan awal, yang menekankan perlunya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja

desa sangat penting dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan desa. Meskipun sebagian besar program dan kegiatan yang dibiayai telah berhasil mencapai target kerjanya, namun masih diperlukan upaya untuk memaksimalkan dampak penggunaan anggaran tersebut. Perlu adanya keseimbangan program agar tidak terjadi kesenjangan antara program pembangunan fisik dan non fisik. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran diidentifikasi sebagai kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang optimal dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

2. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja Penyerapan APBDes

Perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Banyumas. Penyusunan rencana anggaran yang baik dan kesesuaian rencana dengan kebutuhan masyarakat meningkatkan penyerapan anggaran. Namun, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran masih dinilai kurang maksimal. Penyusunan rencana anggaran dan kesesuaian rencana dengan kebutuhan masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran dinilai masih kurang maksimal. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran desa di wilayah Kabupaten Banyumas masih

rendah. Rendahnya keterlibatan masyarakat dapat menghambat penyerapan anggaran karena kurangnya kepemilikan dan dukungan dari masyarakat terhadap program-program yang direncanakan.

Rendahnya keterlibatan masyarakat dapat menghambat penyerapan anggaran karena kurangnya kepemilikan dan dukungan dari masyarakat terhadap program-program yang direncanakan. Temuan ini memperkuat pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran yang belum banyak disoroti dalam penelitian sebelumnya.

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Penyerapan APBDes

Kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyerapan APBDes di Kabupaten Banyumas. Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam mendukung kinerja penyerapan anggaran desa. Hal ini dikarenakan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Banyumas. Pengelolaan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan yang dinilai tinggi, dicerminkan adanya upaya pemerintah desa dalam menyediakan peta/standar kompetensi dan merekrut aparat desa berbasis kompetensi. Namun, pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan dinilai tidak maksimal. Ketersediaan program pelatihan dinilai cukup tersedia, namun anggaran untuk pengembangan kompetensi dinilai kurang memadai. Oleh karena itu keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam

pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di sektor Pemerintahan Desa.

Oleh karena itu keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di sektor Pemerintahan Desa. Identifikasi kendala anggaran ini memberikan wawasan baru dalam mengoptimalkan kompetensi SDM dalam konteks pengelolaan keuangan desa.

4. Pengaruh Administrasi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Penyerapan APBDes

Administrasi pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyerapan APBDes di Kabupaten Banyumas. Sebagian besar desa di wilayah Kabupaten Banyumas telah menerapkan administrasi dan pengawasan pengelolaan keuangan dengan cukup baik. Hal ini dicerminkan dengan adanya ketersediaan dan kelengkapan dokumen/bukti administrasi keuangan yang cukup lengkap serta kesesuaian proses pencatatan/pembukuan dengan standar yang berlaku. Temuan ini mengindikasikan adanya upaya dari pemerintah desa di Kabupaten Banyumas untuk menjaga administrasi keuangan yang baik, meskipun dinilai belum maksimal sehingga masih terdapat ruang untuk dilakukan peningkatan. Dalam hal ini pemerintah kabupaten memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan arahan serta pembinaan terkait dengan pengelolaan keuangan desa

Pengawasan pengelolaan keuangan juga dinilai cukup maksimal, dengan pelaksanaan audit/pemeriksaan keuangan secara berkala yang cukup baik dan juga tindak lanjut atas temuan audit/pemeriksaan keuangan yang cukup baik. Pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Banyumas dilakukan secara vertikal dan horizontal. Pengawasan horizontal dilakukan interaksi antara lembaga atau unit sejajar yang memiliki tanggung jawab yang sama atau sejenis serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses pelaksanaan pembangunan pada setiap tahapan. Dengan melakukan pengawasan secara vertikal dan horizontal yang baik, diharapkan tercipta sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Banyumas.

Terkait penyerapan anggaran, faktor pendukungnya tidak hanya kelengkapan administrasi, tetapi juga keberadaan program lain dari sumber dana lain selain dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa seperti bantuan keuangan yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Kepentingan dan kedekatan dewan dengan pemerintah desa juga berperan dalam mempengaruhi penyerapan anggaran. Sedangkan faktor penghambatnya adalah perubahan regulasi atau kebijakan dari tingkat atas, seperti petunjuk operasional kegiatan atau persetujuan pejabat daerah, yang mengharuskan organisasi menyesuaikan diri untuk mempertahankan legitimasi dan sumber dayanya.

Dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan administrasi keuangan serta penyerapan anggaran, diharapkan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan serta tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara lebih baik. Selain faktor administrasi, penelitian ini juga mengungkapkan faktor-faktor lain yang berpengaruh seperti keberadaan program dari sumber dana lain, kepentingan dan kedekatan dewan dengan pemerintah desa, serta perubahan regulasi dari tingkat atas, yang belum banyak dieksplorasi dalam studi terdahulu.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini mengkombinasikan variabel-variabel kunci seperti perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan administrasi pengelolaan keuangan secara terintegrasi dalam lingkup kabupaten tertentu. Temuan penelitian mengonfirmasi pengaruh positif dari faktor-faktor tersebut terhadap penyerapan APBDes, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor lain yang belum banyak dieksplorasi seperti keberadaan program dari sumber dana lain, kepentingan dan kedekatan dewan dengan pemerintah desa, serta perubahan regulasi dari tingkat atas.

Penelitian ini juga menyoroti area-area yang membutuhkan perhatian khusus, antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, optimalisasi kompetensi SDM dengan dukungan anggaran yang memadai, serta penguatan administrasi dan pengawasan keuangan. Temuan-temuan ini memberikan wawasan baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja penyerapan APBDes di Kabupaten Banyumas maupun daerah lain dengan karakteristik serupa. Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci yang teridentifikasi, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran desa, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pembangunan desa yang lebih optimal dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Banyumas. Lebih lanjut, hasil uji parsial menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kompetensi SDM secara individual juga berpengaruh signifikan terhadap penyerapan APBDes. Namun, administrasi pengelolaan keuangan tidak memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran dan kompetensi SDM dengan

penyerapan APBDes namun hanya menjadi faktor pendorong terhadap kedua variabel tersebut.

Meskipun demikian, ditemukan beberapa tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, keterbatasan anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM, serta masih adanya ruang untuk peningkatan dalam aspek administrasi dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berpengaruh seperti keberadaan program dari sumber dana lain, kepentingan dan kedekatan dewan dengan pemerintah desa, serta perubahan regulasi dari tingkat atas yang mengharuskan organisasi menyesuaikan diri.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi penyerapan APBDes dan area-area yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan di masa mendatang, seperti peningkatan partisipasi masyarakat, optimalisasi kompetensi SDM, serta penguatan administrasi dan pengawasan keuangan desa.

5.2 Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas:

- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa melalui saluran partisipasi yang efektif.

- Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk program pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa.
- Memperkuat administrasi pengelolaan keuangan, termasuk ketersediaan dan kelengkapan dokumen/bukti administrasi keuangan serta kesesuaian proses pencatatan/pembukuan dengan standar yang berlaku.
- Memastikan pelaksanaan audit/pemeriksaan keuangan secara berkala dan menindaklanjuti temuan audit dengan baik untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas:

- Memperkuat upaya pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan administrasi pengelolaan keuangan di tingkat desa.
- Mengoptimalkan alokasi anggaran dari APBD guna mendukung upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengelolaan keuangan di desa

3. Bagi Penelitian Selanjutnya:

- Mengeksplorasi faktor-faktor lain yang berpotensi mempengaruhi kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes, seperti aspek regulasi, kepentingan dan kedekatan dewan dengan pemerintah desa, serta perubahan kebijakan dari

tingkat atas sebagaimana diidentifikasi dalam kesimpulan penelitian.

- Melakukan studi perbandingan antar daerah atau wilayah lain di Indonesia untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait pengelolaan keuangan desa dan penyerapan anggaran.
- Melakukan studi longitudinal untuk menganalisis tren dan perkembangan kinerja penyerapan APBDes dalam jangka panjang, sehingga dapat memperoleh wawasan mendalam terkait faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran desa.

